



Analisis Peluang dan Tantangan PSI Pasca Pemilu 2024: Peluang Jokowi menjadi Ketua Umum PSI

Adhitya Hafizh Rasyadi, Sagitha Dwi Herliany, Syallika Nurussyahadah, Taqya Mafaza*, Abdul Ghofur

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implikasi politik dari wacana keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasca Pemilu 2024, serta mengkaji tantangan internal dan eksternal yang mungkin dihadapi partai tersebut. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami bagaimana sosok Jokowi, dengan gaya kepemimpinan populis dan rekam jejak politik yang kuat, dapat memengaruhi struktur, budaya, dan citra PSI di mata publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki latar belakang politik, serta analisis literatur dan media yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola narasi mengenai peluang dan tantangan dari keterlibatan Jokowi dalam PSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Jokowi di tubuh PSI dapat menjadi katalisator dalam memperluas jangkauan elektoral partai, khususnya melalui pendekatan politik yang lebih membumi dan pro-rakyat. Namun demikian, keterlibatan tersebut juga memunculkan sejumlah tantangan serius. Secara internal, terdapat potensi perubahan ideologi, hingga restrukturisasi budaya organisasi partai. Sementara secara eksternal, muncul resistensi dari publik terkait isu politik dinasti dan kekhawatiran atas hilangnya identitas idealis PSI. Selain itu, tekanan dari partai politik lain juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kehadiran Jokowi berpotensi memperkuat PSI, diperlukan strategi adaptif agar partai tetap relevan dan kredibel di mata pemilih.

Kata Kunci: Peluang, Jokowi, PSI

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2619>

*Correspondence: Taqya Mafaza

Email:

2310413023@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 21-04-2025

Accepted: 13-05-2025

Published: 21-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study analyzes the political implications of the discourse on President Joko Widodo's (Jokowi) involvement in the leadership of the Indonesian Solidarity Party (PSI) after the 2024 Election, and examines the internal and external challenges that the party may face. The main focus of this study is to understand how Jokowi's figure, with his populist leadership style and strong political track record, can influence the structure, culture, and image of PSI in the eyes of the public. The method used in this study is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with informants who have a political background, as well as analysis of relevant literature and media. Data analysis techniques were carried out thematically to identify narrative patterns regarding the opportunities and challenges of Jokowi's involvement in PSI. The results of the study show that Jokowi's presence in PSI can be a catalyst in expanding the party's electoral reach, especially through a more down-to-earth and pro-people political approach. However, this involvement also raises a number of serious challenges. Internally, there is the potential for ideological change, to the restructuring of the party's organizational culture. While externally, there is resistance from the public regarding the issue of dynasty politics and concerns over the loss of PSI's idealistic identity. In addition, pressure from other political parties is also an external factor that needs to be anticipated. This finding shows that although Jokowi's presence has the potential to strengthen PSI, an adaptive strategy is needed so that the party remains relevant and credible in the eyes of voters.

Keywords: Opportunities, Jokowi, PSI

Pendahuluan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu entitas politik kontemporer yang hadir dalam dinamika sistem kepartaian di Indonesia. Secara resmi didirikan pada akhir tahun 2014, PSI tampil sebagai representasi dari semangat politik generasi baru yang progresif, inklusif, dan antikorupsi. Visi yang diusung partai ini adalah membangun Indonesia yang berpihak pada rakyat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghormati keberagaman, menegakkan keadilan, mendorong kemajuan, serta menjaga martabat bangsa. Lebih dari sekadar wadah politik, PSI berkomitmen untuk menjadi kekuatan nasional yang mengedepankan kepemimpinan ideologis, terorganisir, dan terstruktur, serta berkomitmen untuk meneruskan semangat reformasi dan memperkuat demokrasi dengan mengedepankan solidaritas sebagai nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (PSI, 2022).

Secara strategis, PSI menargetkan pemilih muda dan kelompok progresif yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi oleh partai-partai besar. Melalui pendekatan yang inklusif serta penekanan pada isu-isu seperti antikorupsi, toleransi, dan kesetaraan, PSI berupaya membangun citra sebagai rumah politik bagi generasi milenial dan Gen Z. Hal ini diperkuat oleh survei Katadata Insight Center (2023) yang menunjukkan bahwa PSI merupakan partai yang paling merepresentasikan suara anak muda. Penelitian Nur Rohman (2023) dalam artikelnya yang berjudul “Peran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Presiden 2024: Analisis terhadap Pemilih Pemula” juga menegaskan bahwa PSI mampu menarik perhatian pemilih pemula dengan platform politik yang segar, kampanye digital yang aktif, serta komunikasi politik yang efektif di media sosial. Rohman juga menyatakan bahwa PSI memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses demokrasi, menjadikan PSI sebagai kekuatan yang signifikan di kalangan pemilih muda. Namun demikian, berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024, PSI hanya memperoleh 4.260.169 suara atau setara 2,806 persen dari total suara sah nasional angka ini berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen, sehingga PSI tidak berhasil memperoleh kursi di DPR RI (Komisi Pemilihan Umum, 2024; Kompas.com, 2024).

Kegagalan PSI dalam menembus ambang batas parlemen menunjukkan adanya tantangan strategis dalam membangun kekuatan politik yang signifikan di tingkat nasional. Meskipun berhasil menarik simpati pemilih muda dan progresif, PSI masih perlu memperkuat daya saing elektoralnya di tengah dominasi partai-partai besar yang memiliki infrastruktur politik yang lebih mapan serta basis pemilih tradisional yang solid. Dalam hal ini, temuan Djalil et al. (2025) dalam artikelnya “Strategi Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1” menggarisbawahi sejumlah tantangan internal yang dihadapi PSI, seperti lemahnya struktur organisasi, ketidakkonsistenan dalam menyampaikan pesan politik, dan ketergantungan pada figur eksternal. Temuan ini memperkuat gambaran bahwa PSI memiliki kekuatan identitas ideologis, namun belum diimbangi dengan kesiapan

kelembagaan yang memadai untuk bertarung dalam kontestasi politik nasional secara efektif.

Di tengah tantangan tersebut, mencuat wacana mengenai kemungkinan bergabungnya mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PSI. Meskipun belum ada keputusan resmi, isu ini menarik perhatian karena rekam jejak Jokowi sebagai pemimpin yang dinilai berhasil membawa perubahan sejak memimpin Kota Solo, DKI Jakarta, hingga dua periode sebagai Presiden RI. Gagasan “Partai Super Terbuka” yang diusung Jokowi juga selaras dengan visi PSI yang menekankan pada inklusivitas dan partisipasi politik yang luas (Detik.com, 2025). Masuknya figur nasional seperti Jokowi tentu dapat menjadi peluang strategis bagi PSI. Popularitas serta jaringan politik yang dimiliki Jokowi, khususnya di tingkat akar rumput, diyakini mampu mendongkrak elektabilitas partai ini. Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Yoes Kenawas, menyatakan bahwa PSI berpotensi mengandalkan figur Jokowi untuk memperkuat daya saing politiknya, mengingat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi masih sangat tinggi, yakni mencapai 80,8 persen (Tempo.co, 2025). Temuan dari Fieda et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ia tetap memainkan peran sentral dalam konstelasi politik nasional. Melalui pendekatan populis dan strategi politik yang pragmatis, Jokowi mampu membentuk koalisi strategis, memanfaatkan jejaring loyalis, dan mempertahankan pengaruhnya sebagai king maker dalam proses pemilihan presiden. Fakta ini menegaskan bahwa ia memiliki modal politik yang cukup untuk memimpin partai politik dan membentuk arah baru kekuasaan di Indonesia. Dengan modal sosial tersebut, Jokowi diyakini mampu menjadi katalis elektoral yang signifikan bagi PSI dalam menyongsong Pemilu 2029 serta memperbesar daya tawar partai di panggung politik nasional.

Namun, langkah ini juga menghadirkan tantangan internal maupun eksternal, termasuk dinamika politik dalam partai dan persepsi publik terhadap upaya membangun citra dinasti politik. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap faktor-faktor politik yang mendorong kemungkinan Jokowi menjadi Ketua Umum PSI, peluang politik yang dapat diraih PSI, serta tantangan internal dan eksternal yang mungkin dihadapi dalam kepemimpinan Jokowi menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika politik pasca Pemilu 2024. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi strategis PSI dalam konstelasi politik nasional pasca Pemilu 2024, serta mengidentifikasi potensi dampak dari figur Joko Widodo terhadap perkembangan elektoral PSI ke depan

Metodologi

Menurut Yoseph (1979), penelitian adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu masalah. Maka dari itu diperlukan metode untuk mencapai tujuan tersebut (Sitorus, 2020). Metode kualitatif merupakan metode yang cocok untuk penelitian ini. Sebagaimana definisinya, kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat

dikomunikasikan dengan kata-kata, melaporkan perspektif terinci dari sumber informan, dan dilakukan di lingkungan alami (AK, W. W., & ZA, T. 2015). Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk menyampaikan bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasca Pemilu 2024, khususnya dalam konteks kemungkinan Joko Widodo menjabat sebagai Ketua Umum PSI, yang dijelaskan secara ringkas dan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersifat baru (Sugiyono, 2016). Data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara terbuka kepada salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan karena informan dipilih secara sengaja berdasarkan keahliannya yang relevan dengan topik penelitian, yaitu analisis partai politik, dinamika pasca pemilu, dan peran elite politik dalam struktur kepartaian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya (Alir, D., 2005). Data sekunder pada penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen seperti jurnal ilmiah, artikel berita, hasil wawancara media yang terkait dengan PSI dan dinamika politik Joko Widodo.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fenomena yang diteliti (Bogdan & Taylor dalam Lexy J. Moleong, 2006). Dalam hal ini, data hasil wawancara dan dokumen terkait dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Creswell (2007). Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman, dan kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi PSI serta proyeksi politik apabila Joko Widodo benar-benar menjabat sebagai Ketua Umum PSI.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Politik yang Mendorong Kemungkinan Jokowi menjadi Ketua Umum PSI

Kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didorong oleh sejumlah faktor politik yang strategis dan saling berkaitan. Pertama, Jokowi memerlukan kendaraan politik pasca kepresidenannya untuk menjaga eksistensi dan pengaruh dalam lanskap politik nasional. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa PSI akan menjadi kendaraan politik bagi Jokowi untuk memainkan peran sentral di masa depan, mengingat pentingnya peran partai politik dalam pertarungan elektoral, dan bahwa PSI selama ini sudah sangat identik dengan Jokowi, dengan basis konstituen dan elite partai yang loyal kepadanya (Detik.com, 2025). Hal ini juga ditekankan dalam wawancara dengan salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta bahwa posisi Jokowi sebagai figur publik pasca kepemimpinan menghadirkan tantangan tersendiri, dan keputusannya untuk berafiliasi dengan partai

seperti PSI merupakan langkah strategis untuk mempertahankan relevansi dan pengaruh politiknya secara berkelanjutan.

“Ketika seorang mantan presiden masih terus tampil di ruang publik sebagai figur yang netral tanpa kendaraan politik itu bisa menjadi dilema tersendiri. Situasi seperti ini bisa membuat beliau perlu menentukan sikap, termasuk memilih untuk berlabuh ke salah satu partai politik. Dalam hal ini, PSI menjadi salah satu partai yang dirasa punya peluang menjadi kendaraan politik bagi Pak Jokowi.”

Selain itu, pengamat politik Agung Baskoro menegaskan bahwa Jokowi memerlukan dukungan politik untuk menjaga warisan pemerintahannya, sementara PSI membutuhkan figur kuat seperti Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas partai, sehingga hubungan antara Jokowi dan PSI bersifat saling menguntungkan (Kompas.com, 2025). Analisis tersebut juga ditegaskan dalam wawancara kepada salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta mengenai alasan ideologis dan pragmatis Jokowi memilih PSI.

“Tantangan legitimasi pasca-presiden dan kebutuhan untuk tetap relevan sebagai aktor politik membuat beliau perlu menyalurkan modal politik dan ideologinya khususnya ideologi reformasi ke ruang yang lebih konkret. Nah, PSI, sebagai partai yang masih muda, relatif bebas dari beban sejarah, dan belum terlalu terperangkap dalam konflik politik lama, menjadi ruang strategis yang cocok untuk itu.”

Kedua, posisi Jokowi sebagai Ketua Umum PSI berpotensi menjadikannya sebagai *veto player* dan *king maker* dalam menentukan arah kebijakan serta strategi partai, sekaligus memperkuat posisinya di luar pemerintahan. Magnet politik Jokowi yang masih sangat kuat juga menjadi aset elektoral penting bagi PSI, terutama mengingat partai ini belum lolos ambang batas parlemen. Dukungan publik terhadap Jokowi yang masih tinggi mencapai 80,8 persen menurut survei LSI Oktober 2024 menjadi modal kuat jika ia bergabung secara langsung dengan PSI (Tempo.co, 2025). Peneliti LSI, Yoes Kenawas, bahkan menyebut Jokowi sebagai figur populer yang sangat strategis untuk mendongkrak elektabilitas PSI menuju Pemilu 2029. Hal ini diperkuat oleh analisis Jamiluddin Ritonga, yang menilai bahwa konsistensi dukungan PSI terhadap Jokowi membuka peluang besar baginya untuk menjadi ketua umum (nasional.sindonews.com, 2025). Kehadiran Jokowi dinilai mampu melakukan transformasi besar terhadap citra dan basis PSI, yang dikenal kuat di kalangan pemuda urban dengan isu-isu progresif seperti kesetaraan gender, lingkungan, dan antikorupsi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjangkau masyarakat pedesaan dan kelas menengah ke bawah yang merupakan mayoritas pemilih. Dalam konteks inilah, Jokowi berpotensi menjadi *game changer* yang mampu memperluas jangkauan dan daya tarik PSI secara nasional.

“Kalau bicara regenerasi politik, ya pasti. Tentu ini bisa menjadi bentuk regenerasi politik, jadi mungkin gaya kepemimpinan Jokowi atau nilai-nilai ideologi beliau atau motif-motif kepentingan beliau itu kan bisa dalam bentuk transfer knowledge, ada semacam itu ke PSI sendiri,” salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta.

Secara internal, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerapkan sistem demokrasi progresif melalui mekanisme pemilihan ketua umum dengan prinsip *one man one vote*, yang memberikan hak suara setara bagi seluruh kader partai (Kompas.id, 2025). Namun, meskipun demokratis secara prosedural, dominasi pengaruh dan popularitas Jokowi membuat peluangnya untuk terpilih sangat besar, bahkan secara aklamasi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi internal PSI berpadu dengan realitas politik di mana figur sentral seperti Jokowi memiliki daya tarik kuat dan mampu mengonsolidasikan dukungan partai secara luas. Dengan reputasi dan pengaruh yang dimilikinya, proses pemilihannya akan berjalan relatif mudah tanpa tantangan berarti. Dinamika ini mencerminkan bahwa kemungkinan Jokowi memimpin PSI bukan semata aspirasi pribadi, tetapi juga hasil kalkulasi politik strategis demi menjaga kesinambungan kekuasaan, memperkuat posisi PSI, dan meningkatkan daya saing partai dalam peta politik nasional.

“Jadi bisa disimpulkan bahwa PSI memberikan ruang negosiasi yang lebih fleksibel untuk Pak Jokowi dalam mengusung agenda-agenda modernisasi. Ini bisa menjadi faktor politik utama yang mendorong beliau untuk bergabung ke PSI. Ditambah lagi, saat ini beliau masih tampil di media, masih jadi media darling, dan masih punya banyak loyalis di masyarakat. Sampai bahkan ada patung beliau yang didirikan di NTT, yang menunjukkan betapa besarnya dampak dan pengaruh beliau.” ungkap salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta yang mempertegas bahwa langkah Jokowi menuju PSI memiliki dimensi strategis yang kuat dan didukung oleh basis legitimasi publik yang masih kokoh.

Peluang Politik PSI di bawah Kepemimpinan Jokowi

Pasca pemilu 2024, spekulasi politik mengenai langkah lanjutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat, terutama terkait kemungkinan dirinya mengambil alih kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wacana ini mencuat seiring dengan keterlibatan aktif putranya, Kaesang Pangarep, yang telah menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Dengan latar belakang popularitas dan jaringan politik yang luas, Jokowi dinilai memiliki kapasitas untuk mengubah arah dan kekuatan PSI di kancah politik nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Raya partai yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025 (Tempo, 2025). Jika benar maju, langkah ini dianggap sebagai strategi Jokowi untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh politiknya setelah masa jabatan presiden berakhir.

Di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), peluang politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diperkirakan akan mengalami pergeseran signifikan, baik dari segi strategi maupun orientasi kebijakan. Pertama, meningkatnya elektabilitas PSI. Dengan Bergabungnya Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpotensi mendorong lonjakan elektabilitas partai tersebut secara signifikan. Sebagai mantan presiden yang masih memiliki tingkat popularitas dan kepercayaan publik yang tinggi, kehadiran Jokowi dapat menjadi magnet bagi pemilih, terutama kalangan moderat dan milenial yang selama ini menjadi basis target PSI. Dukungan dari loyalis Jokowi mulai dari

kelas menengah perkotaan hingga generasi muda pencinta gaya kepemimpinannya dapat dengan cepat mengubah peta elektoral PSI dari partai kecil menjadi pesaing yang serius.

“Dampaknya terhadap lonjakan elektoral pasti ada ya, dan basis pemilih Jokowi ini sangat loyal, dan rekam jejaknya banyak juga yang mengatakan berhasil dari lembaga-lembaga survei tingkat kepuasan masyarakat itu hampir 80% terhadap pemerintahan Jokowi dan mungkin saja terjadi lonjakan terhadap suara PSI.” salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta

“Dan ketika Pak Jokowi masuk itu tentu akan memberikan efek, tidak banyak tapi pasti ada lonjakan itu karena popularitas Pak Jokowi (Jokowi effect) itu sampai saat ini masih sangat luar biasa” salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta

Dengan latar belakang kekuatan elektoral dan jaringan politik yang telah terbangun selama dua periode kepemimpinannya, Jokowi dinilai mampu membawa PSI keluar dari bayang-bayang partai kecil menjadi kekuatan politik baru yang lebih diperhitungkan. Dari sudut pandang sistem politik, masuknya Jokowi ke dalam struktur kepemimpinan PSI dapat dimaknai sebagai bentuk transfer legitimasi dari ranah negara ke wilayah partai. Dalam kerangka teori sistem politik David Easton, fenomena ini dapat dikaji sebagai bentuk arus masuk (input) berupa harapan dan dukungan masyarakat yang selama ini diberikan kepada Jokowi secara personal, dan kini dialihkan ke dalam bentuk dukungan terhadap institusi politik baru. Keberadaan tokoh kuat di dalam suatu partai akan mengubah seluruh struktur internal partai dan sekaligus memengaruhi output-nya, baik dalam bentuk program maupun strategi elektoral.

Kedua, adanya regenerasi politik. Sementara itu, kehadiran Jokowi juga berpotensi melakukan transformasi mendasar terhadap citra dan basis massa PSI. Selama ini, PSI dikenal sebagai partai yang sangat kuat di kalangan generasi muda urban. Meskipun populer di kalangan tertentu, citra ini juga membatasi daya jangkauan PSI di kalangan masyarakat pedesaan dan kelas menengah ke bawah yang justru menjadi mayoritas pemilih di Indonesia. Di sinilah Jokowi dapat menjadi game changer.

“Kalau bicara regenerasi politik, ya pasti. Karena sudah ada anaknya juga disitu dan beliau juga mantan presiden dan berpengalaman jauh daripada kader-kader PSI. Ya tentu ini bisa menjadi bentuk regenerasi politik, jadi mungkin gaya kepemimpinan Jokowi atau nilai-nilai ideologi beliau atau motif-motif kepentingan beliau itu kan bisa dalam bentuk transfer knowledge, ada semacam itu ke PSI sendiri” salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta

Gaya politik Jokowi yang blusukan dan dekat dengan rakyat kecil dapat membantu PSI menjangkau segmen masyarakat yang selama ini kurang tersentuh oleh partai tersebut. Kemampuannya dalam menyampaikan pesan politik dengan bahasa yang sederhana dan langsung pada persoalan hidup sehari-hari masyarakat, dapat menjadi jembatan bagi PSI untuk memperluas basis dukungannya. Isu-isu kerakyatan

yang menjadi kekuatan Jokowi, seperti stabilitas harga sembako, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses layanan dasar, dapat menjadi pelengkap bagi wacana-wacana progresif PSI yang selama ini mungkin dianggap terlalu "elitis" oleh sebagian masyarakat. Lebih jauh, adanya sosok seperti Jokowi dalam struktur kepemimpinan PSI juga berpotensi menciptakan stabilitas internal. Dengan pengalaman panjang dalam mengelola konflik elite, Jokowi bisa menjadi penyeimbang dalam dinamika internal partai yang mungkin masih rentan terhadap perpecahan atau fragmentasi visi.

Tantangan Internal dan Eksternal

Munculnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru dengan semangat anti-korupsi, pluralisme, dan keterlibatan anak muda telah menandai upaya pembaruan dalam wajah politik nasional. Namun, pada saat yang sama, PSI juga menghadapi tantangan dalam memperoleh legitimasi elektoral secara luas, sebagaimana terlihat dari capaian suara dalam pemilu legislatif sebelumnya. Wacana mengenai keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kepengurusan PSI, bahkan kemungkinan menjabat sebagai Ketua Umum partai tersebut, telah menimbulkan perhatian publik dan pengamat politik. Jokowi, yang dikenal sebagai figur dengan tingkat popularitas tinggi dan pengalaman politik yang luas, dapat menjadi aset strategis bagi PSI dalam meningkatkan daya tarik elektoral dan memperluas basis dukungan. Akan tetapi, keterlibatan seorang mantan presiden secara langsung dalam kepemimpinan partai juga bukan tanpa konsekuensi.

Jika skenario tersebut terjadi, PSI berpotensi menghadapi sejumlah tantangan internal, seperti penyesuaian ideologi partai, konflik kepentingan di antara kader lama dan pendatang baru, serta potensi terjadinya sentralisasi kekuasaan di sekitar figur Jokowi.

"Jika berbicara tantangan Internal, beliau ini masuk bukan tanpa sebab. tetapi, masuk dengan membawa value free atau agenda kepentingan pribadi. Jika PSI menjadi partai yang terbuka, bisa memberikan kesempatan dan menentukan dia mengakomodir kepentingannya otomatis akan ada perubahan dari segi budaya organisasi atau mungkin dari Struktur Partai. Budaya partai atau struktur partai sekarang, ketika beliau masuk. Kalau itu tidak membuat Pak Jokowi memuluskan atau nyaman berarti itu tidak mengakomodir kepentingan beliau itu pasti diperhitungkan juga oleh beliau."

"Pasti akan ada upaya merestrukturisasi partainya yang bisa mengakomodir kepentingannya atau bagaimana beliau menjalankan tipe tipe kepemimpinan beliau pastikan berubah juga menjadi tantangan internal PSI itu sendiri. Bisakah yang lainnya setuju dengan perubahan itu, karena itu tadi beliau masuk pasti tidak mungkin tanpa agenda pribadi" salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta

Pernyataan di atas mencerminkan kekhawatiran akan adanya perubahan mendasar dalam tubuh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) apabila Bapak Joko Widodo benar-benar bergabung dan bahkan memimpin sebagai Ketua Umum. Masuknya seorang figur besar seperti Jokowi tentu tidak terjadi tanpa maksud dan kepentingan tertentu, mengingat posisinya sebagai mantan kepala negara yang memiliki jaringan, pengalaman, dan visi politik yang luas, Jika PSI merupakan partai yang terbuka terhadap perubahan dan

adaptasi, maka kemungkinan besar akan terjadi restrukturisasi internal untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan kepemimpinan Jokowi. Namun, hal ini juga mengandung potensi resistensi dari dalam partai itu sendiri. Budaya organisasi yang selama ini dibangun oleh generasi muda PSI dengan semangat idealisme dan antikorupsi bisa saja mengalami benturan dengan pendekatan politik yang lebih pragmatis atau transaksional yang mungkin dibawa oleh pemimpin baru. Selain itu, perubahan struktur dan arah partai yang disesuaikan dengan kebutuhan figur sentral juga menimbulkan pertanyaan besar.

Di luar tantangan internal, kehadiran Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menimbulkan sejumlah tantangan eksternal yang perlu dicermati secara serius. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan persepsi publik terhadap motif politik di balik keterlibatan beliau dalam kepengurusan partai. Sebagai mantan kepala negara, Jokowi membawa simbol kekuasaan dan legitimasi politik yang kuat. Namun, keterlibatannya secara aktif dalam partai politik pasca-presidensi berpotensi menimbulkan anggapan bahwa langkah tersebut tidak sepenuhnya dilandasi kepentingan publik, melainkan bagian dari strategi menjaga pengaruh politik secara berkelanjutan.

“tantangan eksternal banyak masyarakat yang akan tidak setuju dengan gabungannya beliau itu sendiri, PSI dengan image yang bagus kemudian Jokowi masuk. Orang akan memberikan stigma negatif sendiri PSI. Jika PSI bisa meredam hal negatif maka akan baik baik saja, tetapi sebaliknya jika tidak bisa maka akan menurunkan elektabilitas”
salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta

Lebih lanjut, isu yang tak kalah penting adalah kekhawatiran publik terhadap potensi politik dinasti, mengingat beberapa anggota keluarga Jokowi telah menempati posisi strategis dalam pemerintahan maupun partai. Keterlibatan langsung beliau dalam PSI dapat memperkuat anggapan bahwa partai tersebut menjadi sarana untuk memperluas jaringan kekuasaan keluarga, yang berpotensi mengurangi kepercayaan pemilih, terutama dari kalangan muda yang selama ini menjadi basis dukungan PSI karena narasi idealisme dan politik bersih. Selain itu, PSI di bawah kepemimpinan Jokowi juga akan menghadapi tantangan dalam menentukan posisinya di tengah dinamika pemerintahan nasional yang baru terbentuk.

“hal yang membuat perspektif negatif tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari lawan politik seperti partai besar Golkar atau PDIP yang menjadi lawan politiknya”
salah satu dosen pengajar S1 Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta

Ketika Jokowi sebagai figur sentral mengambil peran aktif, maka setiap sikap politik PSI ke depan akan selalu dikaitkan dengan strategi pribadi atau jaringan kekuasaan yang masih dimiliki oleh beliau, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan atau bahkan kecurigaan dari aktor-aktor politik lain. Dengan demikian, tantangan eksternal ini bukan hanya menyangkut bagaimana PSI mempertahankan citra dan eksistensinya di tengah masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana partai ini bisa memainkan peran politik yang kredibel dalam sistem demokrasi Indonesia.

Simpulan

Wacana Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI mencerminkan dinamika politik pasca-kepresidenan yang kompleks namun strategis. Bagi Jokowi, yang memiliki popularitas dan legitimasi publik tinggi, keterlibatan langsung dalam partai politik seperti PSI adalah langkah logis untuk tetap relevan dan berpengaruh dalam peta kekuasaan nasional. PSI sendiri, sebagai partai muda yang masih berjuang menembus ambang batas parlemen, jelas membutuhkan sosok karismatik untuk memperluas basis dukungan dan membangun kepercayaan publik di luar segmen pemilih muda urban. Masuknya Jokowi bisa menjadi momentum elektoral sekaligus peluang konsolidasi organisasi, namun tidak lepas dari tantangan besar. Secara internal, PSI harus mampu beradaptasi terhadap gaya kepemimpinan Jokowi tanpa kehilangan identitas politik yang selama ini dibangun melalui idealisme dan semangat antikorupsi. Di sisi eksternal, kehadiran Jokowi bisa memunculkan resistensi dari partai-partai besar lain serta kecurigaan publik terhadap potensi politik dinasti, apalagi jika dikaitkan dengan peran aktif anak-anaknya di kancah politik. Bila tidak ditangani secara transparan dan demokratis, manuver ini justru bisa menggerus basis pendukung muda yang selama ini kritis terhadap praktik kekuasaan yang personalistik. Oleh karena itu, keberhasilan skenario ini sangat bergantung pada kemampuan Jokowi dan PSI mengelola transisi ini sebagai regenerasi politik yang segar, bukan sekadar perpanjangan dari status quo kekuasaan. Jika dijalankan dengan cermat dan tetap berpijak pada nilai-nilai progresif, langkah ini berpotensi memperkuat demokrasi Indonesia dengan menghadirkan alternatif politik baru yang lebih inklusif, modern, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Referensi

- AK, W. W., & ZA, T. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar-Raniry Press.
- Alir, D. (2005). Metodologi penelitian. Jakarta: PT Rajawali Prees.
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1984). Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston: Little, Brown and Company.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Demografi Pemilih di Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Easton, D. (1953). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. New York: Alfred A. Knopf.
- Easton, D. (1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley.

- Fahrezi, M. A. H. F., & Rohman, A. Z. F. (2023). Pelembagaan Partai Politik (Studi pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Malang). *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 4(2), 70-81.
- Fieda, O. P., Pramana, G. I., & Erviantono, T. (2024). Analisis strategi politik dan dampaknya terhadap konstelasi politik nasional: Peran Jokowi sebagai 'king maker' dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1(5), 136–147. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/3326>
- Gerald, G. (2019). *Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP. Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS* (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma).
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Katadata Insight Center. (2023, Oktober). PSI dianggap parpol yang wakili anak muda. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/berita/nasional/655324011eb76/survei-kic-psi-dianggap-parpol-yang-wakili-anak-muda>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024. Diakses pada 5 April 2025 dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/19242271/hasil-pileg-2024-psi-gagal-masuk-dpr-cuma-dapat-28-persen-suara-sah>
- Lexy J. Moleong, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Miriam, B. (1993). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Partai Solidaritas Indonesia. (n.d.). Di Pemilu 2024, PSI menyasar segmen pemilih mana? <https://psi.id/di-pemilu-2024psi-menyasar-segmen-pemilih-mana/>
- PSI. (2022). Tentang PSI. PSI. <https://psi.id/tentang-psi/>
- Rohman, N. (2023). Peran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Presiden 2024: Analisis Terhadap Pemilih Pemula. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 85-102.
- Rudini, Djalil, N. A., & Hadiati. (2025). Strategi Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1. *Jurnal Komunikasi Politik*, 12(3), 45-60.
- Sari, A. (2024). Pemanfaatan Media Sosial oleh Partai Politik di Indonesia: Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). *Jurnal Komunikasi Politik*, 12(3), 45-56.

-
- Sitorus, D. (2020). Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung, 170-182.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 14-15
- Walisongo, D. (2025). Kesadaran Politik Generasi Muda di Indonesia: Sebuah Survei. Lembaga Penelitian Walisongo.
- Yoseph & Yoseph. (1979). Dasar Metodologi Penelitian. (PDF Download Available). ResearchGate. <https://www.researchgate.net>>publication